KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masuk Tahun Politik, Kinerja Legislasi DPR Kian Menurun
Tanggal : Selasa, 04 Desember 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Masuk Tahun Politik, Kinerja Legislasi DPR Kian Menurun

JAKARTA – Kinerja legislasi DPR RI kian menunjukkan penurunan. Apalagi di tahun politik saat sebagian besar wakil rakyat kembali sibuk dengan upaya pencalonan mereka sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Tahun ini saja dari target 50 rancangan undang-undang (RUU), DPR hanya berhasil menyelesaikan pengesahan 10 RUU. Kinerja legislasi DPR diprediksi semakin menurun memasuki tahun 2019 dimana sebagian besar wakil rakyat disibukkan dengan aktivitas kampanye. Apalagi sebagian menteri mitra kerja DPR juga mencalonkan diri sehingga waktu mereka juga akan tersita dengan aktivitas politik. "Saya kira pasti akan ada terjadi penurunan intensitas karena banyak kegiatan di dapil, kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga selama untuk tidak menggganggu hal-hal penting di dalam kinerja DPR," ujar Wakil Ketua DPR koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Adapun banyak RUU yang diperpanjang, Fadli menjelaskan, pembahasan RUU ini terkait dengan dinamika pembahasan. Seperti dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), ada perbedaan pendapat antarfraksi mengenai judul, ada yang mengusulkan pengendalian karena kalau pelarangan berarti pelarangan total, ada yang bersikukuh pada pelarangan. "Tetapi nanti akan kita rapatkan kembali, pasti ada waktunya. Dan kalau ini tidak bisa bertemu pada satu titik, mungkin kita akan ambil keputusan," jelasnya.

Namun, lanjut Fadli, beberapa waktu lalu sudah membicarakan di Baleg (Badan Legislasi) bahwa RUU yang terlalu lama perpanjangannya ini perlu ada satu penyikapan bersama, tapi ada juga RUU yang pemerintah tidak setuju. "*Nah*, itu mungkin lain ceritanya, mungkin itu agak sulit untuk ditentukan, dilanjutkan," imbuhnya.

Karena itu, dia menambahkan bahwa pihaknya akan mencoba melakukan lobi khusus dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) karena di situ juga ada penentuan sikap dari fraksi-fraksi termasuk pengusul. "Dari pemerintah juga kadang-kadang pemerintah nggak hadir juga. Itu yang saya dengar di dalam rapat itu. Itu yang membuat lama, jadi tidak sepenuhnya DPR," tandasnya. Sementara itu, anggota Baleg DPR Arsul Sani mengakui bahwa pembahasan RUU ini memang mengalami perlambatan yang luar biasa di tahun politik ini karena tahapan pemilu sudah mulai intens, di mana para caleg melakukan kampanye dan sosialisasi di bawah. "Ini saya kira menjadi catatan bagi kami semua," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, lanjut anggota Komisi III DPR ini, kalau di Komisi III sendiri sudah bersepakat untuk memaksimalkan atau mempergunakan sebaik mungkin waktu sebelum 17 April 2019 di mana masa tugas DPR periode sekarang ini berakhir, untuk memaksimalkan fungsi legislasi. Di Komisi Hukum ini ada finalisasi RKUHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Pemasyarakatan. "Saya kira memang harus jadi fokus kami semua. Malah lebih baik kalau dikritisi terus supaya kitanya tidak terlelap juga. Kalau nggak dikritisi, kan biasanya merasa kita semua *on the track*," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP itu.

Arsul mengakui tidak mungkin bisa semua RUU dalam Prolegnas bisa disahkan. Namun ke depannya, masuknya RUU ke dalam Prolegnas harus diperbaiki, meskipun memang banyaknya aspirasi dari masyarakat ke fraksi terkait mendesaknya pembahasan suatu RUU tidak bisa dihindari. "Saya kira ke depan harus kita perbaiki," pungkasnya.

Perlu diketahui, adapun RUU Minol, RUU Pertembakauan, RUU Iptek, RUU Kewirausahaan, RUU Wawasan Nusantara, RKUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Perkoperasian, RUU Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Kebidanan, Revisi UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU Ekonomi Kreatif.

● **kiswondari**

